

Received: 18-06-2021
Accepted: 18-07-2021
Published: 27-12-2021

**Kerjasama Australia dan Indonesia dalam
menghadapi COVID-19**

Faiz Ramadhan

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Badrus Sholeh

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: faiz.ramadhan18@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract

The COVID-19 pandemic has a huge impact on all countries in the world. COVID-19 has a comprehensive impact, namely health, social and economy. Australia is a country that has had a huge impact. However, Australia succeeded in providing good policies so that Australia succeeded in reducing the COVID-19 number. Australia provides a response and policy effectiveness so that the COVID-19 problem is not too big in Australia. Indonesia is also a country that has been greatly impacted by COVID-19. Indonesia cannot reduce the number of COVID-19 and is far proportional to Australia. Indonesia carried out various policies in overcoming the COVID-19 pandemic but the policies issued were not as good as Australia, Australia provided assistance to Indonesia to deal with the COVID-19 pandemic. Australia provides assistance to Indonesia in various existing sectors. The cooperation and assistance provided by Australia has had a huge impact on Indonesia to reduce the rate of COVID-19.

Keywords: COVID-19, Australia, Indonesia, Cooperation, Policy

Abstraksi

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi seluruh negara yang ada di dunia. COVID-19 memberikan dampak yang menyeluruh yaitu kesehatan, sosial dan ekonomi. Australia merupakan negara yang mendapatkan dampak yang sangat besar. Namun, Australia berhasil memberikan kebijakan yang baik sehingga Australia berhasil menekan angka COVID-19. Australia memberikan respon dan efektivitas kebijakan sehingga adanya permasalahan COVID-19 yang tidak terlalu besar di Australia. Indonesia juga negara yang mendapatkan dampak yang sangat besar dikarenakan COVID-19. Indonesia tidak bisa menekan angka COVID-19 dan berbanding jauh dengan Australia. Indonesia melakukan berbagai kebijakan dalam mengatasi pandemi COVID-19 namun kebijakan yang dikeluarkan tidak sebaik Australia, Australia memberikan bantuan kepada Indonesia untuk menghadapi pandemi COVID-19. Australia memberikan bantuan terhadap Indonesia di berbagai sektor yang ada. Kerjasama dan bantuan yang diberikan oleh Australia sangat berdampak bagi Indonesia untuk menekan angka laju COVID-19.

Kata kunci: COVID-19, Australia, Indonesia , Kerjasama , Kebijakan

Pendahuluan

Penyakit Coronavirus merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh virus Corona. Orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan bisa sembuh tanpa mendapatkan perawatan yang khusus. Namun, jika mengalami masalah medis seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis dan kanker akan mengakibatkan penyakit yang serius dan mendapatkan perawatan medis yang khusus. Penyebaran COVID-19 sangatlah cepat, sehingga COVID-19 telah menyebar ke seluruh dunia. Untuk mencegah dan menghalangi penularan dengan mengetahui tentang virus COVID-19 dan penyakit yang ditimbulkan oleh virus Corona. Melindungi diri untuk menghindari virus ini dengan mencuci tangan, menggunakan masker dan mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada.

Australia pada 1 Mei 2020, mendapatkan jumlah kasus 6.808 positif dan 98 orang mengalami kematian. Perkembangan kasus COVID-19 yang mengkhawatirkan membuat Australia memberikan respon cepat untuk mengatasi COVID-19. Respon yang dilakukan oleh pemerintah Australia yaitu melakukan pembatasan perjalanan yang berasal dari China ke Australia. Australia hanya

memberikan akses masuk bagi warga negara dan penduduk Australia dengan kewajiban melakukan karantina selama 14 hari sejak kedatangan mereka. Perjalanan yang menuju ke Australia kemudian mengalami penurunan yang sangat drastis. Respon yang diberikan pemerintah Australia efektif untuk menurunkan penyebaran COVID-19.

Australia kemudian kembali menutup perbatasan negara mereka sebagai tindakan adanya kenaikan kasus yang berasal dari masyarakat dan masyarakat yang kembali ke Australia dari luar negeri. Penutupan perbatasan ini dilakukan bagi semua non warga dan non penduduk. Australia kemudian melakukan kebijakan karantina wajib bagi setiap warga negara dan penduduk. Australia juga mengeluarkan kebijakan untuk dilakukannya jarak sosial. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia memberikan hasil yang sangat baik dengan adanya penurunan kasus.

Walaupun Australia mengalami pelonjakan kasus COVID-19, namun Australia terbukti berhasil menekan angka COVID-19 yang sangat rendah pada angka 29.116 kasus yang diantaranya kasus sembuh sebanyak 25.486 dan kasus yang meninggal dunia pada angka 909 orang. Angka ini merupakan angka yang sangat

kecil dibandingkan negara-negara lain termasuk Indonesia. Bahkan Australia juga sempat mengalami 0 terhadap kasus baru COVID-19 dalam beberapa minggu.

Indonesia merupakan negara yang memiliki angka kasus COVID-19 yang cukup besar. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi adanya kasus COVID-19 pertama kali pada bulan Maret 2020. Berbeda dengan Australia, Indonesia mengalami kasus yang sangat tinggi dengan total kasus 1,44 juta dengan total sembuh 1.27 juta dan yang meninggal dunia pada menyentuh angka 39,142. Indonesia masih mengalami kenaikan kasus rata-rata diatas 5000 kasus setiap harinya. Sedangkan di Australia hanya 10 kasus setiap harinya. Indonesia yang mengalami kenaikan kasus yang fluktuatif tanpa adanya tren penurunan angka kasus COVID-19 membuat penanganan dan juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih jauh daripada Australia.

Australia dan Indonesia telah membentuk kerjasama yang bernama The Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP). Pejabat-pejabat Australia telah melakukan konsultasi kepada Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan program dukungan untuk jaminan kesehatan dan membangun bersama sebuah komitmen untuk

membentuk dialog kebijakan dan implementasi dari sebuah program yang efektif dan juga berkelanjutan. Tujuan dari program ini sendiri adalah untuk melakukan peningkatan jaminan kesehatan yang ada di Indonesia.

Untuk penanganan COVID-19, Australia melakukan kerjasama dengan WHO sebagai bentuk usaha memberikan bantuan kepada Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19. Australia memberikan kucuran dana hingga mencapai 61 miliar kepada WHO sebagai bentuk upaya dari WHO dan Australia membantu Indonesia mengatasi pandemi COVID-19.

Metode Penelitian

Dalam jurnal ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana penulis berusaha mengeksplorasi dan memahami untuk menjelaskan fenomena internasional yang ada. Penulis melihat bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia sebagai upaya bersama untuk menanggulangi pandemi COVID-19.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, menurut Wardiyanta penelitian deskriptif bertujuan memberikan deskripsi atas sebuah kejadian yang terjadi dan di buat secara sistematis, faktual dan

akurat yaitu kerjasama yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia dalam memberantas pandemi COVID-19. Sedangkan, menurut Sugiyono bahwa ini merupakan metode yang di gunakan untuk menganalisis dan menggambarkan sebuah hasil penelitian dan tidak membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode ini membuat hasil yang didapatkan bukan untuk digeneralisasikan namun dijelaskan secara mendetail dan akurat.

Metode penelitian deskriptif juga digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara beberapa variabel dengan mengamati objek secara spesifik sehingga mendapatkan hasil data yang bisa membantu penelitian. Berdasarkan jenis penelitian deskriptif maka penulis mengambil jenis studi kasus dalam menjelaskan.

Penelitian yang dilakukan secara studi kasus akan melakukan pemusatan terhadap objek yang akan di teliti. Penelitian secara studi kasus menggunakan pengujian secara detail untuk mengetahui latar belakang dari seseorang atau satu individu atau satu objek atau satu tempat yang penyimpanan sebuah dokumen atau terhadap sebuah suatu peristiwa (Bodan dan Bikien.1982) . Sedangkan menurut Maxfield (1930:117-112) dalam Nazir (1988:66) memiliki definisi yaitu sebuah

studi kasus merupakan sebuah penelitian terhadap sebuah status pada sebuah subjek penelitian yang berkenan dengan sebuah fase yang spesifik ataupun memiliki ciri khas terhadap semua personalitas. Tujuan daripada studi kasus ini yaitu untuk menyajikan gambaran yang dilakukan secara detail pada latar belakang, sifat, karakter-karakter khas, status dari seorang individu, yang dimana kemudian dari sebuah sifat khas akan dibentuk menjadi gambaran umum.

Penelitian studi kasus memiliki tiga jenis bentuk yang akan dibedakan melalui karakteristik dan fungsinya, pertama penelitian yang dilakukan secara mendalam. Kemudian yang kedua penelitian yang dilakukan secara instrumental dan yang terakhir ketiga yaitu penelitian studi kasus secara jamak. Dalam melakukan penelitian studi kasus memiliki beberapa langkah-langkah yaitu pertama melakukan perancangan terhadap studi kasus. Perancangan yang dilakukan terhadap studi kasus memiliki tiga buah langkah yaitu, memberikan penyediaan pengetahuan dan keterampilan kemudian dilakukan pengembangan dan melakukan kajian ulang terhadap penelitian. Kedua, melakukan studi kasus yang dimana memiliki tiga langkah yaitu menentukan teknik dalam pengumpulan data, menyebarkan alat pada

pengumpulan data dan menganalisis bukti terhadap studi kasus yang sudah terkumpul.

Kerangka Teori

Teori yang digunakan untuk melihat kerjasama antara Australia dan Indonesia dengan menggunakan pendekatan teori liberalisme. Liberalisme sendiri mempercayai adanya sifat positif kerjasama yang dilakukan oleh aktor negara yang bertujuan mendapatkan keuntungan dan mencapai kepentingan mereka bersama. Liberalisme memandang positif kerjasama yang dilakukan oleh para aktor. Liberalisme juga menghendaki terjadinya kerjasama yang menyeluruh pada setiap negara sehingga menghilangkan terjadinya konflik.

Teori selanjutnya yang digunakan untuk melihat pola kerjasama antara Indonesia dan Australia dengan menggunakan teori Neoliberalisme. Neoliberalisme mengkehendaki adanya dilakukan kerjasama antar negara sehingga membentuk kerjasama yang menyeluruh sehingga terbentuk pola *spider web*. Pola ini mempunyai arti bahwa adanya ketergantungan oleh setiap negara yang ada dalam upaya pemenuhan kepentingan nasional setiap negara yang ada sehingga akan terbentuknya ketergantungan pada setiap negara liannya dalam memenuhi

kepentingan nasional sehingga dapat menghindari adanya persaingan dan kompetisi bagi setiap negara sehingga bisa mengurangi terjadinya konflik.

Tinjauan Pustaka

Pada jurnal ini mengambil dari tulisan dari Fauziah *Australia Government Response to COVID-19: Coordination and the Effectivity of Policy*. Tulisan ini menjelaskan bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Australia untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia memiliki dampak yang sangat besar pada angka COVID-19 di Australia. Jurnal ini juga menjelaskan bagaimana Australia membentuk Kabinet untuk mengatasi pandemi COVID-19. Australia juga melakukan perubahan terhadap segala kebijakan yang ada agar bisa minimalisir pandemi COVID-19. Australia juga memiliki masalah dengan adanya sikap acuh yang dilakukan oleh masyarakat Australia sehingga akan adanya kemungkinan pelanggaran protokol kesehatan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia memberikan rasa percaya dari masyarakat sehingga membuat Australia dapat menekan COVID-19.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Australia menghadapi COVID-19

Pemerintah Australia melakukan pendekatan untuk menghadapi segala tantangan-tantangan pada kesehatan masyarakat yang ini belum pernah sama sekali dihadapi oleh Australia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Australia dengan menggunakan beberapa metode dengan tingkat keberhasilan yang berbeda. Pemerintah Australia melakukan penguncian nasional dan melakukan pengujian yang dilakukan secara massal sebagai upaya menghadapi pandemi COVID-19. Australia juga melakukan penargetan untuk melakukan pemberantasan virus COVID-19 yang dilakukan secara massal dan secara umum yang kemudian menemui keberhasilan dalam melakukan pendekatan tersebut. Ini bisa dilihat dengan hanya Melbourne yang memiliki angka penularan komunitas yang terjadi secara meluas.

Keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah Australia dapat dilihat dengan melakukan perbandingan antara jumlah kasus dan kematian per juta, jumlah pengujian yang dilakukan, persentase terhadap tes positif, dan dengan memasukan variabel kematian.

Langkah awal yang dilakukan oleh Australia dalam menanggulangi pandemi COVID-19 dengan memberikan pembatasan terhadap kedatangan penduduk yang berasal dari China dan kemudian melakukan penerapan terhadap karantina yang sangat ketat. Alasan kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah Australia dilakukan dikarenakan angka yang sangat tinggi di China. Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia mendapatkan respon negatif dari pemerintah China dan masyarakat China. Ini dikarenakan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terkesan buru-buru. Saat WHO memberikan pernyataan bahwa COVID-19 menjadi pandemi membuat Australia bersiap-siap untuk mempersiapkan dua hal. Pertama, pemerintah Australia harus berupaya menekan angka laju penyebaran dari virus. Kedua, mempersiapkan semua sistem kesehatan yang baik dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Respon cepat yang dilakukan oleh pemerintah Australia memperlihatkan remdahnya angka kasus COVID-19 di Australia.

Pemerintah Australia berusaha untuk menjamin kesehatan masyarakat. Namun, walaupun angka kasus di Australia tidak tinggi tetapi adanya ketakutan di Australia. Ketakutan ini dikarenakan masih

tingginya angka masyarakat sebesar 43% mempercayai bahwa COVID-19 tidak berbahaya bagi mereka sehingga ini akan adanya indikasi yang sangat besar adanya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat Australia. Pemerintah Australia juga berusaha melakukan perbaikan dalam komunikasi publik dikarenakan adanya kesulitan dalam memberikan informasi kepada masyarakat namun akhirnya ada perbaikan yang dilakukan.

Pada bidang ekonomi Australia sangat mengkhawatirkan dikarenakan tingkat pengangguran yang ada di Australia mengalami peningkatan sebesar 6,2% karena ekonomi sehingga lebih dari 500 ribu lebih kehilangan pekerjaan (Cranston, 2020). Pemerintah Australia juga hanya bisa memberikan bantuan kepada ekonomi kepada warga negara Australia sehingga warga negara asing disarankan untuk kembali ke negara asal jika mereka tidak bisa mencukupi kehidupan mereka di Australia (ABC, 2020c). Namun, pemerintah Australia memberikan jaminan pada perekonomian masyarakat. Persemakmuran juga telah memberikan bantuan sebesar \$ 1 miliar yang digunakan untuk mendukung daerah, masyarakat dan industri seperti pertanian, perikanan,

pariwisata yang terkena COVID-19 (Dominic, 2020).

Pola pikir yang ada pada masyarakat Australia ini disebabkan dikarenakan adanya informasi yang selalu berubah yang dilakukan oleh pemerintah Australia. Perbedaan informasi ini membuat adanya kebingungan dari masyarakat sehingga ini tidak cukup mengherankan melihat tingginya sikap tidak acuh masyarakat. Para pengamat perpolitikan Australia memberikan kritikan dikarenakan tidak adanya ketegasan yang dilakukan oleh pemerintah Australia. Publik juga menuntut ketegasan ini terutama bagaimana masih adanya ketidaksepakatan antara Persemakmuran dan negara bagian New South Wales terutama dalam menyikapi masalah keamanan anak-anak dalam melakukan kegiatan sekolah (SydneyMorning Herald, 2020)

Australia sendiri merupakan negara yang berbentuk federal. Bentuk negara ini membuat adanya kebijakan yang berbeda yang dilakukan oleh setiap negara federal yang ada kepada masyarakat mereka. Tidak adanya keharmonisan ini membuat permasalahan yang sangat besar. Adanya kesadaran untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah Australia sehingga pada tanggal 13 Maret 2020 dibentuknya

Kabinet Nasional. Kabinet Nasional ini sendiri terdiri dari Perdana Menteri dan Kepala Negara Bagian.. Kabinet Nasional ini dibantu oleh Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC). AHPPC sendiri terdiri dari Kepala Staff Medis Nasional dan Kepala Staff Medis masing-masing negara bagian. Kabinet ini yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan koordinasi dan strategi dalam menanggulangi virus COVID-19 di Australia.

Kabinet ini kemudian memberikan kebijakan dengan melakukan penutupan perbatasan yang dilakukan untuk semua negara yang ada sebagai respon atas adanya lonjakan kasus di Australia. Maka ini pertama kali Australia di dalam sejarah menutup diri dari luar. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Australia sendiri dilakukan berdasarkan saran dari para ahli. Pada sektor kesehatan, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Australia merujuk pada *modelling scenarios* yang dimana sistem ini bisa meminimalisir resiko. Pertama, melakukan physical distancing, kedua meningkatkan kapasitas dari sistem kesehatan dan ketiga melakukan isolasi bagi setiap pasien yang terjangkit virus. Pemerintah Australia juga menerapkan kebijakan lockdown dan hanya memperbolehkan kegiatan yang esensial

yang dilakukan dari belanja, berolahraga, berkerja dan sekolah. Pemerintah Australia juga melakukan tes COVID-19 secara masif yang dimana diliat telah dilakukannya 2, 455,982 tes telah dilakukan sejak Januari hingga Juni 2020 dengan hasil persentase kasus positif sebanyak 0.3%. Pemerintah Australia kemudian melakukan kebijakan *contact tracing* sebagai upaya untuk melakukan pemberantasan terhadap angka COVID-19.

Australia juga mengucurkan dana sebesar \$1.1 Triliun yang digunakan untuk membantu fasilitas kesehatan. Pemberian dana ini dilakukan salah satunya dengan dibentuknya *telehealth* yang digunakan sebagai sarana bantuan kepada masyarakat untuk dapat berkonsultasi kepada dokter dan tenaga kesehatan secara jauh.

Pemerintah Australia juga menyadari bahwa kasus COVID-19 memberikan dampak yang besar pada sektor ekonomi, membuat Australia mengeluarkan kebijakan dengan membentuk *National COVID-19 Coordination Commission* yang didalamnya terdiri dari tokoh bisnis dan organisasi non-profit yang menjadi wadah dalam perumusan kebijakan pada sektor sosio-ekonomi. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai subsidi sosial kepada para *JobSeeker* dan *JobKeeper*.

Kebijakan yang dilakukan oleh Australia walaupun mengundang reaksi negatif namun adanya dukungan yang dilakukan oleh pemerintah Australia. Dukungan ini memberikan dampak yang sangat besar dengan minimnya angka COVID-19. Masyarakat juga mempercayai bahwa pemerintah Australia mempunyai kapabilitas untuk menangani masalah pandemi COVID-19 sehingga membuat masyarakat mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia. Menurut laporan yang dilakukan oleh Democracy 2025 initiative bahwa kepercayaan masyarakat Australia kepada pemerintah tertinggi dibandingkan dari Amerika Serikat, Italia dan Inggris.

Indonesia menghadapi COVID-19

Indonesia melakukan kebijakan yang tidak secepat respon yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia. Respon yang sangat lambat yang dikeluarkan dan adanya informasi bahwa virus ini tidak berbahaya membuat lonjakan kasus yang sangat besar di Indonesia. Menteri Kesehatan Indonesia pada waktu itu Terawan memberikan pendapat bahwa COVID-19 bukanlah virus yang berbahaya dan orang Indonesia kebal akan virus tersebut. Sehingga pemerintah Indonesia tidak melakukan persiapan dan respon yang baik seperti yang dilakukan oleh Australia.

Indonesia juga memiliki permasalahan dengan fasilitas yang tidak memadai serta peralatan kesehatan yang kurang. Bahkan Indonesia mengalami krisis Alat Pelindung Diri (APD) yang sangat dibutuhkan tenaga medis dalam menangani masalah ini. Maka Indonesia mengalami kesulitan yang sangat besar dalam menghadapi pandemi pada periode awal.

Indonesia juga telat melakukan penutupan perbatasan mereka. Indonesia juga masih membuka perbatasan mereka dengan negara Cina yang merupakan negara dengan angka tertinggi pada saat itu. Keterlambatan respon yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memunculkan adanya permasalahan yang besar dikemudian harinya

Indonesia membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) yang dimana diletakkan di perbatasan negara yang berada di bandara/pelabuhan/pos lintas batas darat negara (PLBDN). Indonesia juga pada tanggal 18 Januari 2020 melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan pada 135 titik yang ada pada bandara dan pelabuhan dengan menggunakan alat pemindai suhu. Kementerian Kesehatan juga menunjuk 100 Rumah Sakit untuk menjadi rujukan COVID-19 yang dimana sebelumnya menjadi rujukan pada saat flu burung. Kementerian Kesehatan juga memberikan respon dengan mengacu kepada kebijakan

yang dikeluarkan oleh WHO. Kementerian Kesehatan juga membuka layanan yang dapat diakses oleh masyarakat umum sebagai bentuk komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Indonesia juga melakukan pemulangan terhadap Warga Negara Indonesia yang berada di China dan mengirimkan mereka ke tempat isolasi sebelum mereka dikirimkan pulang ke rumah masing-masing.

Pemerintah juga mengeluarkan dana sebesar 75 triliun pada bidang kesehatan. Dana ini sendiri terdiri dari pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer dan lain-lain yang dimana sesuai dengan standarisasi Kementerian Kesehatan. Indonesia juga melakukan peningkatan terhadap 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19 dan di dalamnya termasuk Wisma Atlet yang menjadi salah satu rujukan bagi masyarakat yang positif COVID-19. Indonesia juga memberikan insentif kepada tenaga kesehatan, santunan kematian dan bantuan-bantuan lain yang berguna untuk menanggulangi pandemi COVID-19.

Indonesia juga mengeluarkan kebijakan pada bidang sosial sebesar 110 triliun yang dimana terdiri dari pemberian

dana sosial, logistik, pemberian santunan PHK serta mengeluarkan kebijakan untuk memberikan subsidi listrik dan air kepada masyarakat yang tidak mampu dan kebijakan lainnya. Indonesia juga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk implementasi baru dari lockdown. Perbedaan daripada *lockdown* dan PSBB sendiri adalah *lockdown* bersifat memaksa sedangkan PSBB berdasarkan kepada kesadaran masyarakat (Eko & Adnan, 2020).

Alasan Indonesia memberlakukan *lockdown* sebagai upaya untuk meminimalisir dampak karena kekeliruan yang ada pada masyarakat yang berpendapat jika diterapkan *lockdown* maka masyarakat tidak bisa berbelanja kebutuhan mereka padahal mereka bisa melakukannya. Maka di bentuk kebijakan PSBB sebagai implementasi dari kebijakan *lockdown* yang dilakukan oleh negara lain.

Indonesia juga memberikan kampanye perilaku 3 M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Pada 20 Juli 2020 dilakukan pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite ini memberikan perluasan jangkauan dan tugas yang dulu dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Gugus Tugas Covid-19).

Indonesia juga menerapkan kebijakan vaksinasi nasional yang dimana gratis bagi setiap masyarakat. Vaksinasi yang dilakukan Indonesia memiliki target 41 juta masyarakat. Pada vaksinasi pertama telah dilakukan sebesar 10 juta dan pada vaksinasi kedua telah mencapai 5 juta masyarakat. Indonesia pada saat ini memberikan tiga tahap yaitu tahap pertama untuk SDM kesehatan, kedua petugas publik dan yang terakhir adalah lansia. Ini membuat Indonesia pada peringkat ke-8 dunia pada jumlah suntikan vaksinasi di dunia. Walaupun, ini masih jauh dari harapan untuk melihat angka vaksinasi di Indonesia. Jokowi juga menerapkan berbagai kebijakan seperti memberikan be,besan kepada konsumsi listrik bagi konsumen yang tidak mampu, menerapkan PSBB dengan ketat, larangan mudik, dan mengeluarkan anggaran besar-besaran yang digunakan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan selama pandemi COVID-19 (Azanella, 2020)..

Kerjasama Australia dan Indonesia mengatasi Pandemi COVID-19

Australia dan Indonesia telah melakukan kesepakatan dalam memberikan dukungan finansial AUD1,5 miliar atau sekitar 15 triliun yang dimana akan dibayarkan dalam rentang waktu 15 tahun. Kerjasama ini sebagai wujud kerjasama

kedua negara dalam mendukung program dalam mengatasi pandemi COVID-19 Active Response and Expenditure Support (CARES) yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB). Menteri Keuangan Indonesia mengatakan bahwa dukungan finansial yang diberikan oleh Australia digunakan sebagai upaya dalam mengendalikan krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Australia memberikan pendapat bahwa Indonesia mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19 dikarenakan ukuran dan kepadatan penduduk di Indonesia. Kesulitan yang di alami oleh Indonesia juga dikarenakan sulit koordinasi dikarenakan desentralisasi yang ada di Indonesia. Australia datang dalam membantu pembangunan sebagai upaya dalam mendukung segala upaya yang dilakukan oleh Indonesia. Australia juga memberikan fokus kepada wanita dan penyandang cacat yang rentan.

Australia juga memanfaatkan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) dalam rangka untuk memberikan kontribusi terhadap pemulihan pada ekonomi dengan menggunakan perdagangan dan investasi. Australia juga

memberikan penasehat ahli di dalam Komite COVID-19 Indonesia dan juga kepada setiap badan-badan yang mengambil peran dalam menangani masalah pandemi COVID-19. Australia juga memberikan dana kepada UNICEF dan WHO dalam memberikan tenaga ahli.

Pemerintah Australia juga telah menyediakan ventilator non-invasif, pelindung diri, alat dan berbagai perlengkapan laboratorium. Australia juga memberikan pendanaan kepada organisasi masyarakat dalam melakukan siaga dan bantuan yang bersifat darurat. Australia juga melakukan perencanaan terhadap kebutuhan kelompok rentan yang ada pada tingkat desa. Australia juga memberikan dukungan segala upaya dalam memastikan adanya akses bagi masalah seksual perempuan dan reproduksi selama pandemi. Australia melalui CSIRO memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk menciptakan vaksin lokal yang aman, efektif, dan dapat diakses. Australia mendukung untuk dapatnya akses yang berkeadilan terhadap vaksin melalui inisiatif yang dilakukan secara multilateral dan regional dalam memberikan biaya, menilai, mengirimkan, dan memantau terhadap vaksin COVID-19.

Australia juga memberi dukungan dalam membentuk sistem yang kuat

sehingga dapat mencegah, deteksi dan memberikan tanggapan terhadap COVID-19 yang memberikan ancaman bagi kesehatan masyarakat. Kemitraan Indo-Pasifik dan Australia akan membantu dan memperkuat kapasitas untuk sistem informasi, memberikan pengawasan, laboratorium, koordinasi nasional serta bagaimana kesiapan dari masyarakat dalam menghadapi masalah pandemi ini. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Australia juga memberikan pendanaan kepada Indonesia untuk penelitian sehingga dapat memperkuat sistem dan kapasitas dengan menggunakan “one health” melalui pendekatan lintas manusia, hewan serta lingkungan.

Pemerintah Australia juga juga melakukan dukungan untuk membangun yayasan kesehatan yang akan mendukung keamanan kesehatan, serta memberikan dukungan kepada program yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Maka ini akan memberikan akses air dan sanitasi yang baik kepada masyarakat dikarenakan ini sangat penting dalam menanggulangi pandemi COVID-19.

Bukan hanya masalah kesehatan, namun Australia juga memberikan bantuan dalam masalah pendidikan di Indonesia. Ini dilihat bagaimana adanya penutupan pada

jangka yang cukup lama pada pendidikan dasar di Indonesia, sehingga Australia akan memberikan bantuan kepada Indonesia dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Australia memberikan bantuan dengan menawarkan program yang menyediakan pada sasaran teknis dan memberikan dukungan dan implementasi yang baru dalam memberikan tanggapan terhadap kebijakan yang ada. Australia juga memberikan pedoman dalam melakukan belajar dari rumah dan bagaimana melakukan persiapan untuk membuka sekolah kembali dengan aman.

Program pertanian juga akan diberikan oleh pemerintah Australia yang bertujuan untuk membantu untuk menjaga produksi pertanian dan serta melindungi para petani yang berada di angka kemiskinan. Produksi dan ketahanan pangan yang bagus akan memberikan bantuan kepada para petani. Australia memberikan bantuan dengan membantu pemasaran, mengatasi permasalahan sistemik dalam masalah pasokan rantai makanan. Australia melakukan kolaborasi dengan Indonesia pada resiko sistem pangan dan biosekuriti yang akan membuat kekuatan keamanan pangan.

Australia juga ikut berkerjasama dengan masyarakat Indonesia sebagai mitra. Melalui bentuk kesetaraan gender

dan sosial. Australia juga berusaha melakukan kepastian terhadap setiap kelompok rentan yang lain agar mendapatkan akses yang sama dalam COVID-19. Australia juga mempersiapkan pembangunan masyarakat dan kepemimpinan perempuan untuk sebagai advokasi kebutuhan dan bantuan yang datang dari pemerintah sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas. Mitra yang dikembangkan nanti akan menjadi mitra yang terlibat kedalam reformasi pada kebijakan nasional dan juga memberikan dukungan terhadap solusi yang ditawarkan solusi lokal untuk masalah lokal. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah Australia akan mendapatkan manfaat seperti perempuan dan kelompok rentan dapat mendapatkan akses bantuan, mendapatkan mata pencaharian alternatif, dan dapat mengurangi dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga serta layanan yang berkeadilan.

Sebagai mitra Indonesia yang strategis, Australia juga berkomitmen dalam melakukan peningkatan ketahanan dan stabilitas di kawasan. Kemitraan ini dengan mewujudkan adanya keadilan, keamanan dan adanya manajemen kebencanaan. Maka dengan melihat masalah yang terjadi pada saat ini, maka ini menjadi bentuk kemitraan yang baik

dengan melakukan kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah negara. Didalam bidang hukum dan peradilan, Australia memberikan bantuan dengan menciptakan sistem peradilan yang beradaptasi dengan dampak dari pandemi COVID-19 termasuk dengan menggunakan teknologi-teknologi yang diberlakukan dan diujicobakan secara daring. Australia juga memberikan bantuan dan nasihat kepada badan-badan pemilu yang ada di Indonesia dalam melaksanakan Pilkada 2020 yang dilakukan selama pandemi.

Masalah perdagangan dan juga pertahanan maka Australia selalu melakukan koordinasi dengan Indonesia untuk terlibat dan mengatasi perubahan-perubahan yang strategis yang terjadi dilungkan di wilayah Australia dan terus melakukan pertempuran dengan segala tantangan keamanan yang ada bahkan pada masa pandemi saat ini. Australia juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ancaman seperti terorisme dan kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional ini berupa penyelundupan manusia, ancaman dunia maya, keamanan di bidang maritim, pencucian uang dan aksi-aksi yang mendanai terorisme. Maka Australia melakukan usaha keamanan yang dilakukan secara dalam negeri dan regional.

Australia juga memberikan dukungan kepada Indonesia untuk melakukan pengembangan terhadap kebijakan fiskal sebagai bentuk tanggapan dalam menghadapi COVID-19. Australia memfasilitasi dengan memberikan para ahli kebijakan yang akan memberikan nasihat dengan memberikan juga desain langkah-langkah untuk bisa memberikan stimulus dan juga dapat promosi stabilitas pada bisang ekonomi dan investasi. Ikut memberikan bantuan dalam melakukan identifikasi sumber baru dalam masalah pembiayaan anggaran, memberikan peningkatan terhadap pendapatan negara dengan melakukan reformasi pada sektor perpajakan, dan memberikan bantuan terhadap anggaran yang prioritas untuk memberikan pendanaan untuk pengeluaran yang terjadi pada sektor kesehatan selama pandemi pada saat ini.

Australia juga ikut memberikan nasihat pada langkah-langkah yang diperukan dalam mengatasi dampak dari pandemi. Memberikan nasihat dalam rangka untuk memulihkan kembali pada pondasi ekonomi. Australia memverikab nasehat terhadap langkah-langkah yang seharusnya diambil pada sektor keuangan. Australia melakukan usaha untuk dapat memberikan rumusan kebijakan yang dapat mendukung pemulihan formal dan informal

pada setiap lini bisnis dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Australia juga memberikan dukungan kepada Indonesia untuk melakukan prioritas belanja negara dalam sektor infrastruktur sehingga akan menjadi dukungan pertumbuhan yang sangat penting. Infrastruktur ini akan memberikan produktivitas yang maksimal sehingga dapat meningkatkan hasil serta meningkatkan lapangan pekerjaan selama berlangsungnya pandemi COVID-19. Australia juga berkerja dalam melakukan pembiayaan terhadap sektor untuk infrastruktur termasuk juga melakukan upaya mendukung pemerintah Indonesia dalam menciptakan infrastruktur yang berkualitas.

Kesimpulan

Pandemi COVID-19 merupakan permasalahan yang sangat besar bagi setiap negara yang ada. Australia merupakan negara yang berhasil dalam menanggulangi masalah pandemi ini jauh lebih baik daripada negara lainnya. Australia mengeluarkan kebijakan dengan melakukan perubahan terhadap sistem yang ada. Kebijakan awal dengan melakukan penutupan perbatasan yang cepat membuat angka COVID-19 tidak terlalu tinggi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia mendapatkan respon berbagai bentuk dari masyarakat. Indonesia

merupakan negara yang memiliki angka kasus COVID-19 yang sangat besar. Respon yang diberikan sangat terlambat sehingga mengakibatkan tingginya angka COVID-19 di Indonesia. Indonesia juga melakukan kebijakan yang kurang baik dalam mengatasi pandemi COVID-19.

Kerjasama yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia sebagai bentuk Indonesia hubungan baik dari pemerintah Indonesia dan Australia. Australia memberikan bantuan dari segala sektor di Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh Australia memberikan dampak yang sangat baik bagi Indonesia.

Referensi

Adekunle, Adeshina. dkk, (2020). "Delaying The COVID-19 Epidemic In Australia: Evaluating The Effectiveness Of International Travel Bans", Australian and New Zealand. Dipetik Maret 2021 dari Australian and New Zealand Journal of Public Health, Vol 44. DOI:<https://doi.org/10.1111/1753-6405.13016>.

Aini, Nur (2020, 16 Juni) Australia-WHO Kerja Sama Bantu Indonesia Respons Covid-19. Dipetik Maret 2021 dari Republika

Australian Government. INDONESIA COVID-19 DEVELOPMENT

- RESPONSE PLAN. Dipetik Maret 2021 dari Australian Government
- Elvira, Vina (2021. 07 April) Hingga April 2021, Indonesia telah mencapai angka 12,7 juta vaksinasi Covid-19 Dipetik April 08 2021 dari Nasional Kontan.
- Gitiyarko, Vincentius (2020, 20 Desember) Kebijakan Pemerintah Menangani Covid-19 Sepanjang Semester II 2020. Dipetik Maret 2021 dari KOMPAS Pedia
- Juaningsih, Imas Novita., Consuello, Yosua., & NurIrfan, Dzakwan (2020) Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan COVID-19 terhadap masyarakat Indonesia. Dipetik April 25, 2021 dari SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH Uin Jakarta. Vol. 7 No. 6 (2020), pp. 509-518, DOI: 10.15408/sjsbs. v7i6.15363
- Kedubes Australia Indonesia Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. Dipetik Maret 2021 dari Kedubes Australia Indonesia
- Kemenkes (2021, 03 Maret) Situasi Vaksinasi COVID-19 Indonesia. Dipetik April 07, 2021 dari Kemenkes.
- Kemlu (2020, 22 April) KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERKAIT WABAH COVID-19. Dipetik April 06, 2021, dari Kemlu.go.id
- Mayangsari, Fauziah R (2020) Australia Government Response to COVID-19:Coordination and the Effectivity of Policy. Dipetik Maret 2021 dari Global&Strategis UNAIR.
- O’Sullivan,Dominic.,Rahmatulla,Mubarak .,&Pawar, Manohar (2020) The Impact and Implication of COVID-19: An Australian Perspective. Dipetik dari SAGE
- Samudro, Eko G & Madjid, M. Adnan (2020) Pemerintah Indonesia Menghadapi bencana nasional COVID-19 yang mengancam ketahanan nasional. Dipetik April 25, 2021 dari Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 26, No.2, Agustus 2020,Hal 132-154 DOI:http://dx.doi.org/10.22146/jkn56318ISSN:2527-9688
- Sebayang, Rehia (2020, 02 Maret) Terawan: Kematian Efek Flu Lebih Tinggi, Kenapa Corona Heboh? Dipetik April 7, 2021, dari CNBC Indonesia
- Susanna, Dewi (2020) When will the COVID-19 Pandemic in Indonesia End. Dipetik April 25, 2021 dari National Public Health Journal. DOI: 10.21109/ kesmas.v15i4.4361
- The Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP)

Widian, Rizky & W, Vrameswari Omega
(2020) ASEAN Regional Potentials
for Combating COVID-19. Dipetik
April 24, 2021 dari Unpar

Woodley, Matt (2020, 08 September). How
Does Australia compare in the
global fight against COVID-19?
Dipetik April 7, 2021, dari RACGP
[https://www1.racgp.org.au/news/gp/
clinical/how-does-australia
-
compare-in-the-global-fight-aga](https://www1.racgp.org.au/news/gp/clinical/how-does-australia-compare-in-the-global-fight-aga)

Worthington, Brett, (2020) . Coronavirus
Pandemic Fears Prompt
Government To Activate
Emergency Response And Extend
Travel Ban” Dipetik Maret 2021
dari ABC

Zahrotunnimah (2020) Langkah Taktis
Pemerintah Daerah dalam
pencegahan penyebaran virus
Corona COVID-19 di Indonesia.
Dipetik April 25, 2021 dari
SALAM: Jurnal Sosial & Budaya
Syar-i FSH UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta